



Penerapan Desentralisasi Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah dari Pola Lama (Sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke Pola Baru (Era Desentralisasi)

Indra Saputra^{1*}, Firman² & Riska Ahmad³

Universitas Negeri Padang, Indonesia

ABSTRACT

The era of educational decentralization has brought fundamental changes in various lives, including educational life. With decentralization, schools will be free to manage resources and sources of funds by allocating them according to priority needs, as well as being more responsive to local needs. Teacher activity and creativity can be realized if a school work climate is created that is conducive and appropriate to the objectives of the activity. The Education Office (including supervisors) does not interfere in the management of learning which is the full responsibility of the school principal. Schools belong to the local community, BP3 and parties who care about the interests of the school. So that students will become subjects not only objects that directly become the focus of the target involved by the teacher in selecting activities.

ARTICLE HISTORY

Submitted 17 December 2022
Revised 24 December 2022
Accepted 31 December 2022

KEYWORDS

Education decentralization; School management

CITATION (APA 6th Edition)

Saputra, I. Firman. & Ahmad, R. (2022). Penerapan Desentralisasi Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah dari Pola Lama (Sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke Pola Baru (Era Desentralisasi). *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian*. 10(2), page.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

indrasaputra110297@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (Haris, S., 2005).

Salah satu desentralisasi pada bidang pendidikan ialah manajemen berbasis sekolah yaitu bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari suatu. Desentralisasi dalam bidang pendidikan yang pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik sehingga berpotensi untuk peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi serta manajemen yang bertumpu di sekolah (Pratiwi, S. N., 2016). Dari Manajemen Sentralistik Menuju Manajemen Desentralistik Pada model lama, pusat memiliki kewenangan yang berlebihan, sehingga terjadilah pemusatan kekuasaan di pusat. Pemusatan kekuasaan ini telah menimbulkan dampak negatif pada sekolah, yaitu selain sekolah tidak berdaya, banyak keputusan-keputusan yang tidak efektif dan efisien. Karena kecil kewenangan yang dimiliki oleh sekolah, maka tidak jarang sekolah acuh tak acuh terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Sedang pada manajemen desentralistik, banyak kewenangan Pusat, Wilayah, dan Kandep yang diserahkan ke sekolah. Dengan pendekatan ini, maka sekolah akan lebih berdaya dan keputusan-keputusan yang dibuatnya akan lebih efektif dan efisien (Hafid, A., 2011).



Agus Wibowo (2013: 128-129) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan MBS, fungsi-fungsi sekolah yang awalnya dikerjakan oleh pemerintah sebagian didesentralisasikan kepada sekolah untuk dijalankan secara profesional. Hal tersebut berarti terdapat fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat dilimpahkan kepada sekolah sepenuhnya, sebagian masih merupakan porsi kewenangan pemerintah pusat, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kota/kabupaten, dan sebagian porsi lainnya dilimpahkan ke sekolah. Dalam MBS, sekolah diberi otonomi yang lebih besar untuk mengelola sumber-sumber daya sekolah yang ada dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat setempat kebijakan pendidikan nasional. MBS sebagai salah satu bentuk penerapan dari Desentralisasi pendidikan mempunyai penataan dimensi manajemen pendidikan dari pola lama (sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke pola baru (era Desentralisasi) (Wahyuningrum, M. M., 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang penerapan desentralisasi pendidikan pada manajemen berbasis sekolah dari pola lama (sebelum desentralisasi pendidikan) ke pola baru (era desentralisasi). Sumber data penelitian merupakan sumber data sekunder, karena data diperoleh dari berita, artikel, dan jurnal publikasi. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan secara dokumentasi, yaitu menganali variabel atau perihal yang diteliti melalui catatan, buku, makalah, artikel berita, hingga jurnal publikasi (Arikunto, 2010).

PEMBAHASAN

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari school-based management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat (Hakim, M. N., 2016). Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai ialah; 1) Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru. 2) Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya local, 3) Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. 4) Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan (Mansur, N., 2013).

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang pengertian MBS akan dibahas terlebih dahulu pengertian manajemen pendidikan. Dadang Suhardan, dkk. (2011: 88) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Sementara itu, Made Pidarta (2011: 8) mengartikan manajemen pendidikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.

Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari suatu. Desentralisasi dalam bidang pendidikan yang pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik sehingga berpotensi untuk peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi serta manajemen yang bertumpu di sekolah (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001). Selain itu MBS dapat diartikan sebagai "Pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan oleh sekolah secara mandiri dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stakeholders) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Direktorat Dikmenu, 2000) Penataan sistem pendidikan yang memeberikan keleluasaan penuh kepada kepala sekolah (dan atas kesepakatan seluruh stafnya) untuk memanfaatkan sumber belajar dan semua fasilitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya itu.

Kemandirian sekolah terutama kepala sekolah dan stafnya dapat diterapkan dalam bidang kurikulum, ketenagaan, dan dana (Mulyadi, M., El Widdah, M., & MY, M., 2020).

Implementasi manajemen berbasis sekolah memiliki tujuan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. (Direktorat, Dikmenum, 200) Peningkatan mutu pendidikan dapat: 1) Melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, 2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, 3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah, 4) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan (Muslim, B., Harapan, E., & Kesumawati, N., 2020). Karakteristik Manajemen berbasis sekolah yang diperlukan atau perlu dimiliki oleh sekolah yang ingin sukses dalam menerapkan MBS adalah sebagai berikut (Patras, Y. E., Iqbal, A., Papat, P., & Rahman, Y., 2019):

1. Output yang diharapkan.

Output/kinerja sekolah/ prestasi sekolah yang diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya.

2. Proses pendidikan meliputi:

Efektivitas PBM tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan yang efektif tenaga kependidikan, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, sekolah memiliki keterbukaan/transparansi manajemen, sekolah memiliki kemauan untuk berubah, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan, sekolah memiliki akuntabilitas, sekolah memiliki sustainabilitas.

3. Input pendidikan meliputi:

kebijakan mutu, sumber daya yang tersedia dan lengkap, memiliki harapan prestasi yang tinggi, focus pada pelanggan (khususnya peserta didik). (Direktorat, Dikmenum, 2000).

Karakteristik MBS tersebut dapat dirinci dalam kegiatan-kegiatan yang jelas seperti guru diberi kebebasan untuk aktif dan kreatif dalam menentukan strategi pembelajaran, memilih sumber, memilih media belajar, mengelola kelas mengevaluasi. Aktivitas dan kreatifitas guru dapat terwujud apabila tercipta iklim kerja sekolah yang kondusif dan tepat dengan tujuan kegiatan. Pihak Dinas Pendidikan (termasuk pengawas) tidak ikut campur dalam pengelolaan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah. Sekolah adalah milik masyarakat setempat, BP3 dan pihak-pihak yang peduli terhadap kepentingan sekolah. Siswa sebagai subyek yang langsung menjadi tumpuan sasaran dilibatkan oleh guru dalam pemilihan kegiatan (Wahyuningrum, M. M., 2006). Jadi, tujuan MBS secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian, mutu sekolah, serta tanggung jawab sekolah terhadap warga sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara itu, secara khusus tujuan MBS adalah untuk membina dan mengembangkan komponen manajemen sekolah, yang meliputi: kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya sekolah (Sari, D. N. A., Bafadal, I., & Wiyono, B. B., 2018).

Agus Wibowo (2013: 128-129) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan MBS, fungsi-fungsi sekolah yang awalnya dikerjakan oleh pemerintah sebagian didesentralisasikan kepada sekolah untuk dijalankan secara profesional. Hal tersebut berarti terdapat fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat dilimpahkan kepada sekolah sepenuhnya, sebagian masih merupakan porsi kewenangan pemerintah pusat, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kota/kabupaten, dan sebagian porsi lainnya dilimpahkan ke sekolah (Kurniawan, R., Riswan, R., & Hilman, C., 2022). Adapun fungsi-fungsi yang sebagian porsinya digarap oleh sekolah dalam kerangka MBS meliputi (Efriani, E., Ahyani, N., & Fattah, A. H., 2021): 1) proses belajar mengajar, 2) perencanaan dan evaluasi program sekolah, 3) pengelolaan kurikulum, 4) pengelolaan ketenagaan, 5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan, 6) pengelolaan keuangan, 7) pelayanan peserta

didik, 8) hubungan sekolah masyarakat, dan 9) pengelolaan iklim sekolah. Dalam MBS, sekolah diberi otonomi yang lebih besar untuk mengelola sumber-sumber daya sekolah yang ada dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat setempat kebijakan pendidikan nasional. MBS sebagai salah satu bentuk penerapan dari Desentralisasi pendidikan mempunyai penataan dimensi manajemen pendidikan dari pola lama (sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke pola baru (era Desentralisasi) (Pasaribu, A., 2017). Penataan dimensi-dimensi manajemen pendidikan oleh Depdiknas (2001) dikatakan sebagai berikut:

Dimensi-dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan

Pola Lama	Pola Baru
Subordinasi	Otonomi
Pengambilan Keputusan Terpusat	Pengambilan keputusan Partisipatif
Pendekatan Birokratik	Pend. Profesional
Ruang Gerak Kaku	Ruang gerak luwes
Sentralistik	Desentralistik
Diatur	Motivasi Diri
Overregulasi	Deregulasi
Mengontrol	Mempengaruhi
Mengarahkan	Memfasilitasi
Menghindari Resiko	Mengelola resiko
Gunakan Uang semuanya	Gunakan uang seefisien mungkin
Individual yang cerdas	Teamwork yang cerdas
Informasi terribadi	Informasi terbagi
Pendelegasian	Pemberdayaan
Organisasi Hierarkis	Organisasi Datar

SIMPULAN

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program dari pada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sementara itu, pada pola baru, sekolah memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sekolahnya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat semakin besar, sekolah lebih fleksibel dalam mengelola sekolahnya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada pendekatan birokrasi, dan sebagainya. Dari perubahan dimensi manajemen pendidikan pola baru pemerintah mempunyai tujuan untuk memandirikan sekolah dengan tanggung jawabnya sebagai stakeholder pendidikan.

REFERENSI

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efriani, E., Ahyani, N., & Fattah, A. H. (2021). Implementasi Manajemen Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 117-121.
- H.A.R. Tilaar (1999), *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hafid, A. (2011). Model Manajemen Berbasis Sekolah. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 14(2), 189-201.
- Hakim, M. N. (2016). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Islam Unggulan. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 104-114.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- <http://antonilamini.wordpress.com/2008/05/18/sentralisasi-dan-desentralisasi-pendidikan/> diakses tanggal 9 Oktober 2011.
- Kurniawan, R., Riswan, R., & Hilman, C. (2022). Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 52-60.
- Mansur, N. (2013). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 14(1).
- MM Wahyuningrum, (2006), *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Desentralisasi Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume 2, Nomor 2.
- Mulyadi, M., El Widdah, M., & MY, M. (2020). Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. In *Prosiding International Seminar On Islamic Studies And Education (Isoise)* (pp. 137-154). Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, B., Harapan, E., & Kesumawati, N. (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 9(1), 149-158.
- Nurkholis (2001), *Hakikat Desentralisasi Model Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta.
- Oemar Hamalik (1991), *Perencanaan dan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Mundar Maju.
- Pasaribu, A. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Patras, Y. E., Iqbal, A., Papat, P., & Rahman, Y. (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Tantangannya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 800-807.
- Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Sari, D. N. A., Bafadal, I., & Wiyono, B. B. (2018). Pelaksanaan supervisi manajerial dalam rangka implementasi manajemen berbasis sekolah. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 213-221.
- Umaedi (2000), *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan sekolah untuk peningkatan mutu)*, *Dinamika Pendidikan No.1/tahun VII*, Yogyakarta, FIP – UNY.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen: Teori Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 3*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuningrum, M. M. (2006). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Desentralisasi Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 113819.. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Desentralisasi Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 113819.